

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (studi kasus: Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)

1st M. N. Zola Lado SS. GP, * ^a

2nd Kadek Wiwin Dwi Wismayanti S.E., MAP. ^b

3rd I Ketut Winaya S.Sos., M. AP. ^c

^{a,b,c}. Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Udayana.

ABSTRACT

Community Participation In Development Of Mandalika Special Economic Zone (Case Study: Kuta Village, Pujut District, Central Lombok Regency) Development is a continuous government effort with the aim of improving people's welfare. In a development, community participation is one of the important factors that encourage the success of a development. In recent years, the government has sought development by establishing Special Economic Zones in each region that has industrial potential, one of which is the Mandalika Special Economic Zone, Kuta Village, Pujut District, Central Lombok Regency. This research looks at how the participation of the people of Kuta village, Pujut sub-district, Central Lombok district, is in the development of the Mandalika special economic zone. This research uses a descriptive research type with a case study approach. The data sources used are primary and secondary data. The informant fraud technique uses a purposive sampling method. Based on a research study using the participation theory of Cohen and Uphoff (1977), the results of this study indicate that the participation of the people of Kuta Village in the development of the Mandalika Special Economic Zone has been carried out quite well, but there are several problems such as socialization which is still not effective even though several have been implemented. times and the quality of human resources who are still not ready to support the development of the Mandalika Special Economic Zone. In its development, the people of Kuta village actively participate in making development decisions, implementing development, evaluating development and utilizing development results. In making decisions and evaluating development, the participation of the Kuta village community is carried out by participating in deliberations and meetings, while in the implementation and utilization of development results, the Kuta village community participates by providing the workforce they have.

Keywords: Development, Community Participation, Special Economic Zones.

*Correspondence: zolalado2799@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, pembangunan mempunyai dampak yang sangat besar dalam perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, mengingat beberapa daerah di Indonesia punya sumber daya yang berpotensi sebagai fungsi peningkatan kualitas perekonomian masyarakat. Pembangunan adalah suatu kegiatan yang terus menerus dan tanpa henti yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Perencanaan pembangunan di pandang sebagai upaya yang lebih masuk akal dan terorganisir untuk pembangunan masyarakat yang belum berkembang ataupun baru saja berkembang. Devenisi itu merujuk pada usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang sistematis sehingga mampu mewujudkan perubahan dari masyarakat berkembang ke masyarakat maju. Pembangunan juga tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat, sebab pada dasarnya pembangunan bersifat partipatory. Pola pembangunan partisipatif adalah mengikutsertakan semua pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, sehingga dinamakan "pembangunan partisipatif". Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan termasuk wujud dari penghargaan pada



masyarakat yang berada di wilayah pembangunan untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan yang sama. Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa, pembangunan harus melalui perencanaan yang punya fungsi sebagai perbaikan kualitas ekonomi masyarakat serta punya dampak dalam mengubah masyarakat dari yang tertinggal menjadi masyarakat yang lebih maju. Lebih jauh lagi, Pembangunan diharapkan mampu menambah nilai produktifitas sehingga nantinya bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. serta memberi suatu wadah kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Beberapa tahun belakang ini pemerintah Indonesia sedang berfokus kepada pembangunan sektor prioritas Kawasan Ekonomi khusus di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan utama pemerintah dalam pembentukan kawasan ekonomi khusus adalah untuk meningkatkan investasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus (selanjutnya disebut KEK) adalah kawasan yang berada dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi. dan mendapatkan fasilitas khusus. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan dengan menyiapkan kawasan yang punya dua keunggulan, adapun keunggulan yang dimaksud adalah keunggulan Geostrategis dan Geoekonomi. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 19 wilayah di Indonesia yang dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Dari 19 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia, saat ini pemerintah terfokus pada pembangunan Kawasan 5 Ekonomi Khusus Mandalika Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dinilai punya potensi pada zona pariwisata. Dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Terdapat 16 desa penyangga. Dari 16 desa penyangga tersebut, terdapat 5 desa penyangga inti dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, yaitu Desa Kuta, Sengkol, Mertak, Prabu, dan Tumpak. Dalam proses pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, sudah semestinya masyarakat Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah diberi wadah untuk terlibat pembangunan kawasan tersebut, mengingat masyarakat Desa Kuta termasuk objek inti dari pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika,

Berdasarkan hasil observasi, dalam proses pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, kegiatan partisipasi masyarakat masih belum dilaksanakan secara maksimal. Masalah-masalah yang terkait dengan partisipasi masyarakat bisa dilihat secara langsung maupun dari isu yang berkembang di masyarakat Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Dalam Proses perencanaan program pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, sosialisasi maupun musyawarah dari pihak Pemerintah maupun pihak ITDC sebagai pelaksana program terbilang dilaksanakan secara tergesa sehingga banyak masyarakat Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah tidak mengetahui akan adanya pembangunan kawasan tersebut. Kesimpangsiuran perencanaan itu juga berimbas saat pelaksanaan program pembangunan, akibatnya terjadi beberapa konflik antara pihak ITDC dan Masyarakat. Konflik yang dimaksud adalah konflik yang terkait dengan pembebasan lahan dan perekrutan tenaga kerja pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Masalah lain dari pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terkait dengan perekrutan tenaga kerja. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika diperkirakan mampu menyerap sekitar 27.694 tenaga lokal. Namun dalam prosesnya, banyak dari masyarakat Desa Kuta justru tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, salah satu sebab dari tidak maksimalnya perekrutan itu adalah masyarakat tidak mendapatkan informasi perekrutan.

Dari uraian penjelasan diatas, maka judul yang di angkat yakni “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Studi Kasus Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah” dengan tujuan mengetahui proses pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, serta mengetahui partisipasi masyarakat desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

2. KAJIAN PUSTAKA

PEMBANGUNAN

Pembangunan yakni suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan tingkat kehidupan masyarakat, keberhasilan pembangunan bisa dilihat dari perbaikan dari segi kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan keadilan yang di rasakan oleh

masyarakat. Herrick dan Kindleberger (1988:58) membagi teori pembangunan ke dalam empat kategori berikut: teori pembangunan klasik, neo klasik, tahapan linear, serta revolusi ketergantungan. Dalam teori pembangunan klasik, pembangunan adalah pergeseran dari orientasi masyarakat klasik ke modern-rasional. Munculnya birokrasi di setiap bidang kehidupan dan munculnya partai-partai oposisi sebagai akibat dari perluasan dominasi pusat adalah tanda-tandanya.

Menurut Karl Marx, pembangunan adalah perubahan sosial yang dihasilkan dari perselisihan kelas, yang berpuncak pada perubahan kehidupan masyarakat. Menurut Rostow, gagasan fase linier, yang berarti teori kemajuan dari yang belum berkembang menjadi maju, bisa dijelaskan dalam tahapan yang harus dilalui setiap negara. Sebelum menjadi negara maju, sebuah negara berkembang harus menjalani fase tinggal landas. Suatu bangsa harus bisa memperluas pertanian, industri, dan perdagangan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkelanjutan agar bisa lepas landas.

Pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan tujuan menjamin suatu pembangunan sesuai tujuan yang ditentukan, sementara evaluasi dilaksanakan dengan maksud mengetahui pencapaian dan tujuan dari pelaksanaan rencana suatu pembangunan. Dalam suatu pembangunan pemerintah mempunyai landasan kewenangan pada pengendalian pembangunan, yaitu:

1. Hak atas lahan (bundles of right) Hak atas lahan merupakan, kekuasaan pemerintah yang berkaitan dengan hak atas lahan, hubungan hukum suatu lahan, serta perbuatan hukum yang terkait dengan lahan.
2. Pengaturan (police power) Yakni yurisdiksi pemerintah untuk memberlakukan undang-undang yang berupaya melindungi kesehatan, keselamatan, moralitas, dan kesejahteraan publik.
3. Pencabutan hak katas lahan (Eminent Domain) Kewenangan pemerintah dalam melaksanakan ambil alih lahan, dalam kewenangan ini pemerintah memiliki kewajiban dalam memberi kompensasi atas dasar kepentingan umum.
4. Taxation Yakni kekuasaan untuk memungut pajak berlandaskan tugas hukum pemilik tanah untuk kepentingan barang publik.
5. Spending power Yakni kekuasaan pemerintah untuk membelanjakan uang publik untuk kepentingan publik, dengan tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengendalian pembangunan, pemerintah berkewajiban untuk berusaha secara maksimal untuk mendayagunakan SDM dan SDA suatu wilayah. Usaha pemerintah dilaksanakan melalui pengembangan sektor pertanian, industry, dan jasa. Pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam memberi akses masyarakat dalam melaksanakan partisipasi sebagai wujud dalam proses pengambilan kebijakan publik.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi menurut Hoofstade (1971) yang dikutip Khairudin (2000) berarti "the taking part in one or more phase of the process" ataupun partisipasi adalah kegiatan mengambil bagian dari proses pembangunan. Partisipasi adalah dasar dari strategi pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan berkelanjutan, dan termasuk proses interaktif yang berkesinambungan. Prinsip inti keterlibatan masyarakat adalah tindakan pemerintah yang mencakup keterlibatan masyarakat sejak awal hingga penilaian. Menurut taksonomi partisipasi Wignyo A. Pretty (2009), ada tujuh tahap yang berbeda, dari keterlibatan pasif hingga mobilisasi:

1. Partisipasi pasif. Dalam partisipasi ini, umumnya pesan yang disampaikan pemimpin proyek pembangunan ataupun administrator ke masyarakat bersifat perwakilan tanpa mendengar tanggapan masyarakat.
2. Partisipasi informatif. Dalam partisipasi ini, peneliti kegiatan pembangunan akan melaksanakan survey kepada masyarakat, serta melaksanakan observasi lebih lanjut mengenai tempat pelaksanaan pembangunan. Namun, temuan studi ini tidak lagi dipresentasikan kepada masyarakat umum.

3. Partisipasi melalui konsultatif. Pihak administrator yang umumnya diwakili oleh orang luar melaksanakan konsultasi dengan masyarakat kawasan pembangunan.
4. Partisipasi fungsional. Dalam partisipasi ini, Sebagai bagian dari pelaksanaan inisiatif pembangunan, masyarakat menciptakan kelompok yang bermakna.
5. Partisipasi insentif. Masyarakat menyumbangkan pengorbanan dan jasa dengan imbalan kompensasi insentif berupa gaji, sementara tidak terlibat dalam proses pembelajaran ataupun percobaan yang dilakukan.
6. Partisipasi Interaktif. Anggota masyarakat terlibat dalam proses analitis untuk merencanakan kegiatan dan membangun ataupun meningkatkan kelembagaan
7. Partisipasi mandiri (selfmobilization). Masyarakat mengambil inisiatif untuk mengubah sistem mereka ataupun cita-cita yang mereka pertahankan tanpa dampak dari luar.

3. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan penggunaan pendekatan studi kasus. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Observasi dan Wawancara secara mendalam kepada stakeholder yang memiliki pengetahuan secara mendalam mengenai kegiatan partisipasi masyarakat Desa Kuta dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, sedangkan data sekunder diambil dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk melengkapi data, peneliti juga melakukan eksplorasi perpustakaan guna melengkapi data. Peneliti juga menyajikan data berupa data teks yang bersifat deskripsi, data tabel, dan grafik dari informan penelitian, sehingga menjadi suatu penjabaran yang tersusun secara sistematis yang melengkapi data penelitian,

Fokus peninjauan ini adalah partisipasi masyarakat desa kuta dalam pembangunan Kawasan ekonomi khusus mandalika, kecamatan pujung, kabupaten Lombok tengah, terutama partisipasi mereka dalam proses pembangunan seperti, pengambilan keputusan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengambilan manfaat pembangunan, dan evaluasi pembangunan Teknik pengambilan data pada penelitian ini menekankan pada hasil observasi dan wawancara untuk mengamati partisipasi masyarakat desa kuta dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Adapun informan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kepala dinas pariwisata kabupaten Lombok tengah, informan ini dianggap mampu memberikan informasi terkait dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa kuta dalam program pembangunan.
2. Komisioner ITDC Mandalika, informan ini dianggap mampu memberikan informasi mengenai segala bentuk kinerja dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah, informan ini dianggap mampu memberikan informasi terkait sebaran tenaga kerja masyarakat desa kuta dalam pembangunan Kawasan tersebut,
4. Kepala desa kuta, informan ini dianggap mampu memberikan informasi dan mengetahui secara langsung kegiatan pembangunan Kawasan tersebut.
5. Masyarakat Desa Kuta lingkaran Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, dipilih sebagai informan dikarenakan masyarakat desa kuta merupakan objek dari pembangunan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan

Konsep Cohen dan Uphoff (1977) partisipasi mengenai pengambilan keputusan pembangunan berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam memberi gagasan ataupun ide dalam menentukan arah dari suatu pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam

perencanaan program diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam bentuk kegiatan seperti kehadiran rapat, sumbangan pemikiran, maupun pendapat yang bersifat mendukung ataupun menolak pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan rapat ataupun musyawarah masyarakat Desa Kuta dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun ITDC selaku pengelola program, masyarakat diberi kebebasan untuk memberi ide, gagasan, saran maupun kritik mengenai program pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Proses musyawarah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, dilaksanakan dengan dua model, yaitu musyawarah dengan masyarakat Desa Kuta secara langsung dan Musyawarah yang diwakilkan oleh masing-masing kepala dusun. Musyawarah ataupun rapat yang bersifat perwakilan dikarenakan pelaksanaan rapat berada di provinsi sehingga tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan seluruh masyarakat Desa Kuta.

Hasil dari kegiatan musyawarah yang sifatnya perwakilan nantinya akan diumumkan oleh pemerintah desa dan kepala dusun ke masyarakat desa kuta. Tingkat keberhasilan suatu pembangunan, tidak terlepas dari bagaimana pengambilan keputusan dalam proses merencanakan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan termasuk bahan yang sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum kegiatan pelaksanaan pembangunan. memberi kesempatan masyarakat untuk berperan aktif menyalurkan ide mereka dalam merencanakan program akan membuat tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan semakin baik. Peran serta masyarakat Desa Kuta dalam perencanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika bisa dilihat dari tingkat kehadiran musyawarah ataupun rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pengelola program pembangunan. Melalui keikutsertaan musyawarah masyarakat Desa Kuta dalam merencanakan program pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika diharapkan pembangunan kawasan itu terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa Kuta, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan perencanaan musyawarah antara pemerintah, pengelola program pembangunan, dan masyarakat desa kuta berjalan dengan sangat baik, tidak ada kendala yang signifikan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan tersebut

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Konsep Cohen dan Uphoff (1977) partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan termasuk kegiatan lebih lanjut mengenai perencanaan yang sebelumnya sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam program pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pengelola program bertugas melaksanakan control dan pemberdayaan kepada masyarakat Kawasan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat berdampak dalam proses pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan umumnya dilaksanakan dengan cara memberi tenaga berupa material serta mengikutsertakan tenaga kerja masyarakat lokal dalam pembangunan Kawasan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, sumber daya dari Desa Kuta diberi akses sebesar-sebesarnya untuk aktif ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. ITDC selaku pihak pengelola program pembangunan memberdayakan masyarakat dengan cara memakai tenaga kerja yang berasal dari Desa Kuta. Perekrutan tenaga kerja lokal menunjukan bahwasanya pihak pengelola mengedepankan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, masyarakat desa kuta ikut serta dalam menyumbang tenaga kerja yang dipakai dalam proses pembangunan fisik di Kawasan ekonomi khusus mandalika. Tenaga kerja tukang yang sebelumnya diberi pelatihan kontruksi, serta menjadi tukang inti dalam pembangunan infrastruktur seperti Jalan penghubung bandara internasional Lombok dengan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pembangunan hotel berbintang di Kawasan pembangunan, serta pembangunan sirkuit mandalika. Selain tenaga kerja Tukang, masyarakat Desa Kuta juga ikut serta membangun dan menjaga landscape sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, ITDC selaku pengelola program pembangunan juga berkerjasama dengan jasa konstruksi yaitu Widia Karya dan Nindia Karya, selain memberdayakan tukang lokal, pihak penyedia jasa juga melaksanakan kerjasama dengan masyarakat desa kuta yang punya jasa pengangkutan truck pasir sebagai penyedia

transportasi utama pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Selain menjadi tenaga kerja di bidang pembangunan, masyarakat desa kuta juga direkrut menjadi Satpam di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, yang berfungsi sebagai pengaman dari Kawasan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat desa kuta dalam pelaksanaan pembangunan, menjadi unsur penting dari pelaksanaan pembangunan, keterlibatan ini mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan aktif, serta ikut mengawasi kegiatan pembangunan.

Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat Hasil Pembangunan

Konsep Cohen dan Uphoff (1977) partisipasi dalam pengambilan Manfaat pembangunan berarti bahwasanya masyarakat yang berada di Kawasan pembangunan berhak untuk ikut serta menikmati hasil pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan bisa dilihat dari adanya peningkatan Output. Bentuk output yang dimaksud adalah kemanfaatan program pembangunan itu bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kawasan pembangunan. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika diresmikan pada tahun 2017, pasca peresmian banyak event-event yang dilaksanakan oleh ITDC selaku pengelola program pembangunan. Pelaksanaan event-event di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tentunya tidak terlepas dari kegiatan partisipasi dari masyarakat Desa Kuta, di tahun ini ITDC meresmikan masjid nurul bilad yaitu masjid terbesar di Kabupaten Lombok Tengah, dalam peresmian ini pemuda desa kuta direkrut menjadi panitia event. Selain peresmian itu di tahun 2017 ITDC juga memulai pembangunan hotel Pullman, ITDC dan PT Widya Karya melaksanakan kerjasama dalam proses perekrutan tenaga tukang yang berasal dari masyarakat Desa Kuta, sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan pasca peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Lebih jauh lagi masyarakat Desa Kuta ikut berpartisipasi sebagai panitia, penyedia jasa konsumsi dan souvenir dalam beberapa event yang dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, adapun event yang dimaksud adalah Cycling Tour De Lombok, Torch Rally Asian Games, Paragliding, Mandalika Ultra Trail dan Bazaar Mandalika. Pasca peresmian ITDC selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika bekerjasama dengan ISED (Innovation And Investment For Inclusive Sustainable Economic Development) untuk memberi pelatihan ketenagakerjaan kepada masyarakat desa Kuta, pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan professional sebagai penunjang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Di Tahun 2021 tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa kuta direkrut menjadi tenaga kerja pada pengaspalan Sirkuit Mandalika dan pembangunan PLTS Mandalika. Dalam pemanfaatan hasil program pembangunan, tenaga kerja desa kuta diberi akses untuk bekerja di hotel dan resto yang berada di bawah naungan ITDC, tak hanya itu tenaga kerja yang berasal dari desa kuta juga bekerja sebagai tenaga kebersihan dan pengamanan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dampak manfaat dari pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika juga dirasakan oleh masyarakat desa kuta yang punya jasa akomodasi villa, peningkatan jumlah wisatawan mendorong meningkatnya jumlah penyewa kamar villa. Dampak pembangunan Kawasan itu juga dirasakan oleh para penggiat UMKM dibidang Kuliner dan Tenun, terjadi peningkatan jumlah penjualan barang hasil dari hasil produksi masyarakat desa kuta. Dampak pembangunan juga dirasakan secara langsung oleh para pemuda Desa Kuta, selain menjadi tenaga kerja di hotel, mereka juga direkrut menjadi marshall pada event MOTO GP dan World Superbike (WSBK).

Berdasarkan analisis hasil temuan terkait dengan partisipasi masyarakat desa kuta dalam pemanfaatan hasil pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang dikaji memakai teori partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff (1977) bisa disimpulkan bahwa, pemanfaatan hasil pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus terlaksana dengan baik, salah satu faktor pendorongnya adalah pemerintah secara terbuka memberi akses masyarakat desa kuta untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan pembangunan. Keterlibatan masyarakat desa kuta dalam pemanfaatan hasil program pembangunan menunjukkan bahwasanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika berorientasi kepada masyarakat. Orientasi pembangunan yang mengutamakan masyarakat punya potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Kawasan pembangunan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan

Konsep Cohen dan Uphoff (1977) kegiatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam mengontrol, menilai, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui hasil dari pelaksanaan pembangunan. Sama halnya dengan perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat Desa Kuta dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan Kawasan ekonomi khusus Mandalika dilaksanakan dengan melaksanakan rapat dan musyawarah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh ITDC dengan mengundang pemerintah desa ring 1 kawasan ekonomi khusus Mandalika, tokoh adat, tender pembangunan serta kepala dusun dari masing-masing dusun di desa Kuta kecamatan pujut kabupaten Lombok tengah. Dalam tahap evaluasi pembangunan, ITDC bekerjasama dengan Universitas Mataram untuk menyebarkan kuesioner kepada masyarakat terkait dengan evaluasi dampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika pada peningkatan perekonomian masyarakat Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, hasil pengolahan kuesioner nantinya akan dilaporkan ke ITDC selaku pengelola program pembangunan. Hasil musyawarah dan kuesioner itu akan menjadi patokan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Berdasarkan analisis hasil temuan terkait partisipasi masyarakat desa kuta dalam evaluasi pembangunan memakai teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1977) bahwasanya partisipasi masyarakat desa kuta dalam musyawarah evaluasi pembangunan terlaksana dengan baik, dalam pelaksanaan musyawarah masyarakat secara aktif memberi masukan-masukan yang terkait dengan pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan. Masyarakat desa kuta memberi masukan terkait dengan perekrutan tenaga kerja, pembinaan UMKM, dan pengelolaan wisata bahari di desa kuta. Proses kegiatan musyawarah terkait dengan evaluasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan tingkat kehadiran rapat yang baik, pemberian kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat, serta tidak adanya kendala dalam jalannya musyawarah evaluasi pembangunan. Dampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika juga dilihat melalui hasil dari penyebaran kuesioner oleh pihak ITDC selaku pengelola program pembangunan Kepada masyarakat desa kuta. berlandaskan hasil analisis yang dilaksanakan peneliti sesuai wawancara dengan narasumber penelitian bisa diketahui bahwa, hasil evaluasi kuesioner menunjukkan bahwasanya Masyarakat Desa Kuta sudah mengetahui program-program dari ITDC pasca pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, adapun program-program itu adalah Workshop Industri, Sertifikasi tukang, pelatihan dasar kewirausahaan, dan pelatihan akuntansi kepada masyarakat desa kuta. Hasil evaluasi kuesioner juga menunjukkan bahwasanya pasca pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat desa kuta. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika juga memberi dampak kepada UMKM di desa kuta, sesudah adanya pembangunan permintaan produk mereka mengalami peningkatan

Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Desa Kuta Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Adapun faktor pendukung pelaksanaan partisipasi masyarakat desa kuta dalam pembangunan Kawasan ekonomi khusus Mandalika, berlandaskan hasil temuan peneliti di lapangan, yaitu sebagai berikut:

- a) Komunikasi yang baik antara Pihak ITDC selaku pengelola Program dengan pemerintah dan masyarakat desa kuta termasuk salah satu faktor pendukung yang mendorong efektifnnnya partisipasi masyarakat desa kuta dalam proses pembangunan Kawasan ekonomi khusus Mandalika.
- b) Pembinaan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah, Lembaga Penyedia jasa Kontruksi dan Balai Latihan Kerja Lombok Tengah juga menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat Bantuan promosi UMKM yang dilaksanakan oleh pihak ITDC selaku pengelola program pembangunan menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa kuta dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, sebelumnya para penggiat UMKM hanya berfokus pada kegiatan produksi produk, dan konsumen yang dimiliki hanya berasal dari ruang lingkup desa kuta saja, namun sesudah ada kegiatan promosi

UMKM yang dilaksanakan oleh pihak ITDC membuat konsumen tidak hanya terfokus pada pasar lokal melainkan juga turis mancanegara.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Desa Kuta Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Ada beberapa permasalahan partisipasi masyarakat desa kuta dalam pembangunan Kawasan ekonomi khusus mandalika, umumnya permasalahan yang timbul terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. berlandaskan analisis temuan peneliti, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- a) Ada beberapa masyarakat desa kuta yang tidak mengetahui pelaksanaan musyawarah, bahkan informasi yang terkait dengan musyawarah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus terbelang tergesa dan tidak diinformasikan dengan baik.
- b) Kurangnya kemampuan berbahasa inggris masyarakat desa kuta menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, terfokus pada pembangunan industri pariwisata, sehingga kemampuan berbahasa inggris menjadi hal yang paling diutamakan dalam perekrutan tenaga kerja yang bekerja di Hotel dan Restoran yang berada di Kawasan ekonomi khusus mandalika.
- c) Belum banyaknya tenaga kerja tukang desa kuta, yang punya sertifikasi tukang resmi menjadi salah satu penghambat pembangunan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan Infrastruktur, kepemilikan sertifikasi tukang termasuk hal yang penting, mengingat pembangunan beberapa infrastruktur seperti jalan raya penghubung, sirkuit mandalika, dan beberapa hotel diwajibkan untuk setiap tukang yang bekerja punya sertifikasi tukang.
- d) Masih banyaknya masyarakat terutama para pegiat pariwisata dan para pemilik UMKM yang belum efektif dalam memanfaatkan adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong para penggiat wisata dan UMKM Desa Kuta untuk ikut serta memanfaatkan hasil pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilaksanakan pada penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kawasan ekonomi khusus mandalika studi kasus desa kuta kecamatan pujut kabupaten Lombok tengah yang diukur berlandaskan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1977), maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa:

- 1. Partisipasi masyarakat desa Kuta dalam pengambilan keputusan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sudah terlaksana dengan baik. partisipasi masyarakat desa kuta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara Rapat dan Musyawarah rencana pembangunan. Dalam pelaksanaannya masyarakat Desa kuta aktif dalam menghadiri kegiatan rapat dan musyawarah yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan ITDC selaku pengelola program.
- 2. Partisipasi Masyarakat desa kuta Dalam Pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terlaksana dengan cukup baik. ITDC selaku pihak pengelola program pembangunan memberi kesempatan yang besar bagi sumber daya manusia yang dimiliki desa kuta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja yang berasal dari Desa Kuta menjadi prioritas utama pelaksana pembangunan
- 3. Partisipasi masyarakat desa kuta dalam pengambilan manfaat pembangunan sudah terlaksana dengan cukup baik. Pemanfaatan hasil pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dilaksanakan dengan cara memberi akses masyarakat desa kuta untuk bekerja di Kawasan tersebut. Tenaga kerja desa kuta direkrut menjadi karyawan di hotel dan restoran yang berada dibawah naungan ITDC, selain itu pemuda desa kuta ikut serta dalam event Moto GP. Adapun kendala dalam partisipasi ini adalah kemampuan Bahasa

inggris masyarakat desa kuta yang masih belum baik, namun hal itu bisa dikendalikan melalui pembinaan oleh pihak pemerintah dan ITDC selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

4. Partisipasi masyarakat desa kuta dalam evaluasi pembangunan terlaksana dengan baik, sama halnya dengan perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan musyawarah. Selain dengan masyarakat desa kuta, musyawarah juga dilaksanakan dengan kepala desa ring 1 pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Selain melalui musyawarah, pihak ITDC juga bekerjasama dengan Universitas Mataram, yang bertugas menyebarkan kuesioner terkait evaluasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika ke masyarakat desa kuta, adapun hasil dari kuesioner ini nantinya akan dilaporkan ke ITDC dan menjadi acuan pembangunan selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Pembangunan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Budiman (2018). Sosiologi Pembangunan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell W John. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Demani, N.P. Intan Dan Tahit, M.E (2007). Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan: Alfabeta.
- Fauzi Nur Febri. (2018). Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartini Ngemplak Sleman Yogyakarta. Skripsi Sosiologi.
- Gaffar, Abdul (2006). Persoalan Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo.
- Soekanto Soerjono (2014). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. R&D. Bandung: Alfabeta.
- Theresia Aprilia Dkk. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Gloria Iyong, Ingerid L. Moniaga, Johansen C. Mandey. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Di Kecamatan Likupang Timur, 10(1), 01-12
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987, 1–14.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 15(1), 91–104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. Jurnal Ekonomi Pembangunan, (1), 75-98.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI Press
- M. Wahyudin, H Mustari, Harna. (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Vol 3 No 1 Hal 90-99.
- Martiana Dwi Rahayu (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi Ilmu Sosial.
- Murba. (2017). Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ereconnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Skripsi Filsafat Dan Politik.
- Mustikawati. (2016). Partisipasi Masyarakat Infrastruktur Desa Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tanggerang Kabupaten Kutai Kartanegara. E-Journal Ilmu Administrasi Negara. Vol, 4 No.2.
- Noor M. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Civis. 1 (2). 87-102.

Nugraha, Rizkar. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. 2(3). 2-45.

Nur Aida (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

Nur Annisya (2017) Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa. 1 (4). 12-35

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Mandalika.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

infrastruktur desa dan solidaritas (internet)

<https://kpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/view/5474> tanggal di akses 8 desember 2022

<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3103> tanggal di akses 8 desember 2022

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/80/FITRIA%20NUR%20STB.%204515021018.pdf?sequence=1&isAllowed=y> tanggal di akses 8 desember 2022

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jrmdk/article/download/7273/4077> tanggal di akses 8 desember 2022